

**DILEMATIS MEDIA DALAM PEMBERITAAN  
KONFLIK DAN KEKERASAN**

**Christiany Juditha**

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Makassar  
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI  
email: [christiany.juditha@kominfo.go.id](mailto:christiany.juditha@kominfo.go.id)

**ABSTRACT**

*The media is now widely proclaimed vulgar conflict and violence, and sometimes no longer have a good sensor. In fact by presenting the news or impressions repeatedly will adversely affect the behavior of the audience. The purpose of this study to obtain an overview about dilemma of the media in news of conflict and violence. The method used is content analysis with a qualitative approach. The study concluded that the media wherever located and operates always have the potential functional and dysfunctional. Media has the potential to spread the spirit of peace and also to alleviate the conflict. Conversely also has the potential dysfunctional due to potentially worsen or trigger a prolonged conflict. Time for the media to accommodate various alternative paradigms that allows for an atmosphere of peace through the news that brings peace where professional journalism, ethics, conscience and personal sensor fused participate in it.*

**Keywords: Impressions, Conflict, Violence, Television.**

**PENDAHULUAN**

Jika kita memperhatikan tayangan berita tentang konflik di media massa khususnya di televisi beberapa tahun terakhir ini, maka kita akan mendapati tayangan yang sangat dominan dengan kekerasan. Tidak dipungkiri bahwa hal ini merupakan akibat dari perkembangan keterbukaan informasi pasca reformasi digulirkan. Namun keterbukaan informasi yang berujung kebebasan pers yang nyaris tidak terkendali melahirkan semakin banyaknya program acara televisi maupun berita-berita

yang disiarkan begitu gamblang dan cenderung menuai keresahan di kalangan masyarakat.

Masyarakat mulai resah dengan banyaknya tayangan televisi yang mengandung tindakan kekerasan. Seolah tayangan-tayangan tersebut menjadi hal yang bisa karena seringnya ditayangkan. Kekerasan yang ditampilkan pun dalam berbagai bentuk baik secara fisik maupun non fisik justru ditonjolkan dalam tayangan televisi. Bahkan secara umum banyak kalangan menilai bahwa tayangan televisi di negeri ini sebagai tayangan yang tidak lagi bermutu dan tidak mendidik.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pusat sendiri menerima sebanyak 13.805 aduan masyarakat atas siaran televisi di berbagai jaringan di Indonesia sepanjang 2014. Data aduan tersebut dikumpulkan melalui berbagai sarana yang disediakan KPI baik melalui surat elektronik (e-mail), SMS, media sosial (Twitter dan Facebook), dan saluran telepon. Aduan masyarakat pada saluran-saluran televisi tersebut terkait pelanggaran kode etik penyiaran dan mengganggu kepentingan publik termasuk di dalamnya tayangan-tayangan kekerasan (Republika, 2014).

Dibanding media massa lainnya, memang televisi memiliki dampak yang luar biasa dalam tayangan-tayangannya. Tidak hanya program-program televisi yang dinilai banyak mengandung nilai-nilai konflik dan kekerasan, tayangan-tayangan didalam program berita pun tidak kalah banyaknya. Berita tentang perkelahian antar kelompok, demonstrasi mahasiswa/warga yang berujung bentrok, tawuran pelajar dan lain sebagainya secara vulgar ditayangkan televisi-televisi nasional. Tidak hanya televisi, media surat kabar, dalam pemuatan gambar-gambar dan kalimat-kalimat dalam pemberitaan konflik dan kekerasan juga tidak sedikit dimuat. Mengapa terjadi demikian? Apakah media massa ini semata-mata hanya mementingkan ego pemberitaan semata untuk bisa

menyiarkan berita yang paling cepat, utama dan menarik (karena bisa menampilkan tayangan serta gambar-gambar di lokasi kejadian yang sementara terjadi konflik) dibanding pesaing-pesaingnya? Adapun rumusan masalah dalam kajian ini adalah bagaimana dilematis media dalam pemberitaan konflik dan kekerasan. Tujuannya untuk mendapat gambaran tentang dilematis media dalam pemberitaan konflik dan kekerasan.

### TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian-penelitian tentang tayangan-tayangan kekerasan di televisi sudah banyak dilakukan. Salah satu diantaranya berjudul “Tayangan Bermasalah dalam Program Acara Televisi di Indonesia yang dilakukan oleh Afifi tahun 2010. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kekerasan dan sadisme, pornografi dan seksualitas, serta pelecehan terhadap nilai-nilai kesopanan dan moralitas banyak ditemukan dalam program-program televisi yang didominasi oleh program-program hiburan, seperti sinetron, *infotainment*, *reality show*, *variety show*, dan komedi situasi. Kondisi ini disebabkan oleh persaingan antar stasiun televisi yang sangat ketat dalam memperebutkan rating. Selain itu, persoalan regulasi penyiaran yang tidak jelas.

Penelitian lain berjudul “Kekerasan Simbolik (*Symbolic Violence*) Terhadap Suku

Jawa dalam Program TV ‘Hidup Ini Indah’ di Trans TV” yang dilakukan Hasfi (2011). Penelitian ini mencoba untuk mengevaluasi isi program televisi, "Hidup Ini Indah", yang diproduksi oleh Trans TV yang diindikasikan melakukan kekerasan simbolik untuk Jawa. Simbolik integrasi bahaya kekerasan dari masyarakat multikultural di Indonesia karena menghasilkan diskriminasi dari ‘budaya dominan’ lebih ‘budaya minoritas’. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kekerasan simbolik (*symbolic violence*) di program televisi tidak kalah berbahaya dengan kekerasan fisik (*physical violence*) yang selama ini lebih menjadi perhatian dan hal tersebut terdapat di program acara ‘Hidup Ini Indah’ yang ditayangkan Trans TV. Proses berlangsungnya sangat halus menyebabkan para pengontrol isi media (KPI, LSF) sulit untuk mengidentifikasi dan mengukur pelanggaran program semacam ini sehingga tetap bisa tayang dengan bebas. Bahkan masyarakat sebagai pengonsumsi media mungkin tidak menyadari bahwa apa yang ditonton telah melukai kelompok tertentu, karena biasanya didalamnya dicampur dengan konteks hiburan, pendidikan dan informasi sehingga seolah patut untuk ditonton. Jika didiamkan maka stereotipe atas suatu golongan yang

dimunculkan dan diproduksi oleh media akan tertanam di benak masyarakat secara perlahan namun pasti dan akan menumbuhkan diskriminasi antar SARA secara laten. Hal ini tentu membahayakan karena didukung kekuatan media massa (televisi) yang selama ini menjadi agen penyebar realitas media yang isinya selalu menjadi panutan masyarakat karena jangkauan siarnya yang luas.

“Kekerasan di Televisi: Perspektif Kultivasi” merupakan judul penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ahmadi dan Nova Yohana (2007). Penelitian ini masih mengangkat masalah kekerasan pada televisi. Hasilnya televisi terbukti menjadi media yang efektif yang penjangkauan dan penetrasi ampuh yang tak terkalahkan dibandingkan dengan media lainnya khususnya tayangan yang berisi bahan kekerasan. Dengan demikian orang secara alami belajar kekerasan dari televisi. Menjadi *overexposed* untuk bahan kekerasan, sehingga dengan mudah orang mendapatkan cara-cara dengan kekerasan sekaligus digunakan untuk memecahkan masalah mereka dengan cara kekerasan juga.

Perbedaan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian

ini yaitu, penelitian ini khusus mengangkat tayangan-tayangan berita di berbagai televisi baik yang ada di Indonesia maupun di negara lain juga surat kabar. Sehingga hasilnya pun dapat dilihat secara lebih general dan umum. Karena itulah kajian ini sangat penting untuk dilakukan.

### **Konstruksi Media dalam Membingkai Konflik Kekerasan**

Media massa mempunyai kekuatan dan peran besar dalam membentuk realitas. Realitas merupakan hasil karya (konstruksi) media terhadap sebuah peristiwa atau fakta. Setiap upaya menceritakan (konseptualisasi) sebuah peristiwa, keadaan atau benda tak terkecuali mengenai hal-hal apapun adalah usaha mengkonstruksi realitas (Hamad, 2004).

Media menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi cerita atau wacana yang bermakna. Seluruh isi media tiada lain adalah realitas yang telah dikonstruksikan dalam bentuk wacana yang bermakna. Realitas yang diciptakan media adalah realitas simbolik hasil produk atau rekayasa para pengelola (redaksi, wartawan, produser, dan semua orang yang bekerja di media). Pekerjaan media pada hakekatnya adalah mengkonstruksi realitas dan isi media adalah hasil karya para pekerja media mengkonstruksi berbagai realitas yang

dipilihnya. Problemnya realitas yang dibentuk media ini dianggap sebagai kebenaran oleh audiens (Eriyanto, 2002).

Watson sendiri menjelaskan bahwa konsep kebenaran yang dianut media massa bukanlah kebenaran sejati, tetapi sesuatu yang dianggap masyarakat sebagai kebenaran, dengan kata lain kebenaran hasil bentukan media massa. Peran media dalam mengkonstruksi realitas seperti sebuah pekerjaan yang harus dilakukan (Sobur, 2001). Artinya bahwa berita-berita tentang konflik dan kekerasan yang ditayangkan secara leluasa di media televisi merupakan proses konstruksi media itu sendiri. Sehingga hal tersebut dianggap sebagai realitas dan kebenaran oleh masyarakat yang menontonnya.

Little John mengatakan media massa tidak langsung menimbulkan dampak bagi khalayak. Nyatanya banyak variabel terlibat dalam proses terjadinya efek. Sedangkan Klapper menyatakan bahwa media massa hanya sebagai "*contributing cause*". Komunikasi massa terjadi lewat serangkaian perantara. Komunikasi antara lain melalui pengaruh media massa. Untuk sampai kepada perilaku tertentu, maka pengaruh ini diseleksi, disaring, atau bahkan mungkin ditolak sesuai dengan faktor-faktor personal yang mempengaruhi reaksi khalayak, faktor

situasional di mana individu berada, dan situasi lingkungan, baik primer (keluarga) atau sekunder (lingkungan masyarakat).

Namun Anderson dan Bushman (2002) mengatakan bahwa terpaan media massa yang mengandung kekerasan oleh banyak ahli diyakini memiliki kontribusi dalam meningkatkan perilaku agresif. Meskipun, kekuatan pengaruh dan apakah ia menjadi satu-satunya faktor pengaruh dan dalam kondisi bagaimana terpaan kekerasan di media dapat menunculkan agresivitas telah pula menjadi perdebatan (Freedman, 1986).

Salah satu jenis media massa yang diyakini memiliki pengaruh yang kuat pada khalayak adalah media audio visual atau televisi. Pengaruh tayangan kekerasan di televisi terhadap agresivitas telah ditunjukkan oleh para ahli (Bushman dan Anderson, 2001). Kekuatan pengaruh media televisi disebabkan media jenis ini tidak hanya mampu mengoptimalkan pesan melalui pendengaran, melainkan juga penglihatan dan gerakan sekaligus, dimana pesan bergerak memiliki daya tarik lebih dibandingkan pesan statis.

Tayangan televisi yang mengandung unsur kekerasan dapat meningkatkan level kecenderungan agresi terhadap orang lain, baik pada anak maupun orang dewasa.

Perilaku agresi secara negatif berhubungan dengan perilaku menolong (Baron & Byrne, 2000). Menurut Baron, Byrne, & Branscombe (2006), ketika menonton televisi, individu dapat mengidentifikasi diri terhadap tokoh dalam tayangan program televisi tersebut. Dalam hal ini, adanya sebuah reaksi emosional yang muncul terhadap kegembiraan (*joys*), dukacita (*sorrows*), dan ketakutan (*fears*) yang dialami oleh tokoh tersebut. Hingga disini dapat disimpulkan bahwa televisi merupakan salah satu media yang dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak bagi khalayaknya. Beberapa hasil penelitian jelas menyimpulkan hal tersebut. Namun tidak dipungkiri bahwa faktor lain diluar media televisi tersebut juga ikut mempengaruhi perilaku khalayak.

### **Fungsi Media dalam Pemberitaan Konflik dan Kekerasan**

Sebagai media komunikasi, lembaga sosial, produk informasi, dan lembaga ekonomi fungsi utama media adalah sebagai mediator, mengawasi, menyediakan informasi dan menghibur (Abrar, 2011). Dalam menjalankan kegiatan mediasi, media seharusnya bersifat netral dan tidak berpihak. Artinya dalam pemberitaan tentang konflik, media benar-benar menyampaikan pesan dari

kedua belah pihak yang bertikai. Sekalipun sikap netral tidak mudah dilakukan, namun media harus tetap berusaha untuk tidak berpihak. Karena hanya dengan memiliki sikap yang netral dan tidak berpihak pada satu golongan yang berkonflik maka media dapat menjalankan fungsinya sebagai mediator.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis isi dengan pendekatan kualitatif. Adapun unit analisis yang merupakan focus kajian ini adalah isi berita dari berbagai stasiun televisi baik nasional maupun dari stasiun televisi luar negeri. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga penentuan sampel diambil secara acak melalui Youtube dan harian Kompas yang sesuai dengan konsep-konsep tayangan berita tentang konflik dan kekerasan melalui televisi.

Hasil pengumpulan data kemudian diperbandingkan dengan hal-hal yang berkaitan dan pemilihan kunci-kunci perbedaan yang muncul dalam setiap kategori atau item tayangan. Kesemuanya ini kemudian dianalisis sehingga menghasilkan sebuah gambaran sebagai jawaban dari rumusan masalah yang dicari.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Salah satu contoh tayangan yang penuh dengan kekerasan adalah konflik mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) dengan aparat polisi di Makassar yang ditayangkan oleh Metro TV. Sebenarnya konflik berawal dari protes mahasiswa terhadap pihak rektorat tentang kebijakan kampus, namun karena aksi demonstrasi mereka cenderung mengarah ke tindakan-tindakan anarkis, maka diturunkanlah aparat kepolisian di lokasi kampus UNM. Sayangnya konflik yang awalnya antara mahasiswa dan pihak rektorat justru berkembang menjadi konflik antara mahasiswa dan aparat keamanan. Dan justru media membingkai beritanya menjadi suatu memberitaan yang sarat dengan tindakan kekerasan baik yang dilakukan oleh mahasiswa maupun polisi. Terlihat bagaimana sang reporter melaporkan peristiwa ini secara *live* dengan menggunakan helm pengaman yang menunjukkan bahwa bisa saja dalam melaksanakan tugas reportasenya, reporter juga bisa kena serangan lemparan batu dan lain-lain akibat dari konflik tersebut. Digambarkan juga bagaimana mahasiswa beramai-ramai merusak mobil polisi, memecahkan kaca, menginjak-injak di bagian atas mobil dan kemudian membalikkan mobil itu. Ironisnya berita yang disiarkan *live* itu berlangsung berjam-jam. Bahkan kembali diulangi penayangannya disore dan malam hari hingga

## DILEMATIS MEDIA DALAM PEMBERITAAN KONFLIK DAN KEKERASAN



**Gambar 1.** Metro TV menayangkan konflik antara mahasiswa dan polisi di Makassar  
(Capture video to picture:courtesy of YouTube)

Peristiwa konflik lainnya (antara warga Tanjung Priok dan Aparat Keamanan) yang disiarkan oleh SCTV tentang rencana pemindahan makam Mbah Priok. Kerusuhan di wilayah Koja, Tanjung Priok dengan vulgar ditayangkan melalui televisi. Api yang berkobar-kobar membakar gedung dan kendaraan disekitar lokasi, tawuran masyarakat setempat dengan aparat, hingga kepanikan warga ikut dibingkai dalam pemberitaannya.

Bahkan seorang saksi yang penuh dengan lumuran darah diwajah dan dadanya ikut diwawancara dan memberikan keterangan tentang kerusuhan tersebut. Berita ini juga diberi judul yang bombastis : “Tanjung Priok Berdarah”. Sesuai judul dan gambar-gambar yang ditayangkan yang penuh dengan lumuran darah.



**Gambar 2.** SCTV menayangkan konflik warga dan aparat dalam kasus pemindahan makam Mbah Priok, Jakarta (Capture video to picture:courtesy of YouTube)

Belum lagi peristiwa-peristiwa lainnya, seperti konflik agama (kasus Akhmadiyah) bagaimana media sangat tidak memihak kelompok ini. Atau peristiwa penangkapan

gembong teroris Nurdin M. Top yang disiarkan secara *live* dan dramatis seperti adegan sinetron atau film oleh televisi. Seolah-olah kita yang menontonnya ikut hanyut di

## DILEMATIS MEDIA DALAM PEMBERITAAN KONFLIK DAN KEKERASAN

alam perang. Dan peristiwa-peristiwa konflik lainnya yang dimuat dan diberitakan melalui media massa yang sangat jauh dan belum berpihak pada jurnalisme damai. Bahkan dari

sini dapat kita lihat bahwa media berpotensi sebagai *issu intensifier* dimana media mampu memunculkan isu/konflik dan mempertajamnya (Eni Setiasi, 2005).



**Gambar 3.** TV One menayangkan siaran langsung penyerangan gembong teroris Nurdin M.Top, Temanggung (*Capture video to picture:courtesy of YouTube*).

Realitas konflik memang menjadi sangat dilematis bagi pers. Hukum pasar yang bertumpu pada diktum *never ending circuit of capital accumulation* mendorong media untuk menyajikan informasi semenarik dan sedramatis mungkin. Hal inilah yang menyebabkan realitas konflik (perang, pertikaian politik, kerusuhan, tawuran, demonstrasi yang anarkhis, dan sebagainya) selalu menjadi primadona pemberitaan. Konflik selalu menyajikan sensasi dan daya magnetik yang besar bagi publik. Liputan konflik dapat secara signifikan menaikkan oplah, rating, hit, *leverage* sebuah media. CNN mampu membangun reputasi sebagai media berita utama di dunia melalui liputan-liputan konflik dari berbagai negara. Sejarah juga menunjukkan bahwa pada tahun 1991 media cetak nasional mencapai oplah tertinggi,

tatkala meletus perang Irak-Amerika. Dan seperti yang telah disampaikan diawal tulisan bahwa hari-hari kita sebagai pemirsa televisi, dapat menyaksikan betapa sepuluh menit pertama dalam *regular news program* televisi-televisi hampir selalu diisi dengan berita soal kerusuhan, demonstrasi yang ricuh, perkelahian atau peristiwa yang terkait dengan terorisme.

### Media Memperhebat Konflik

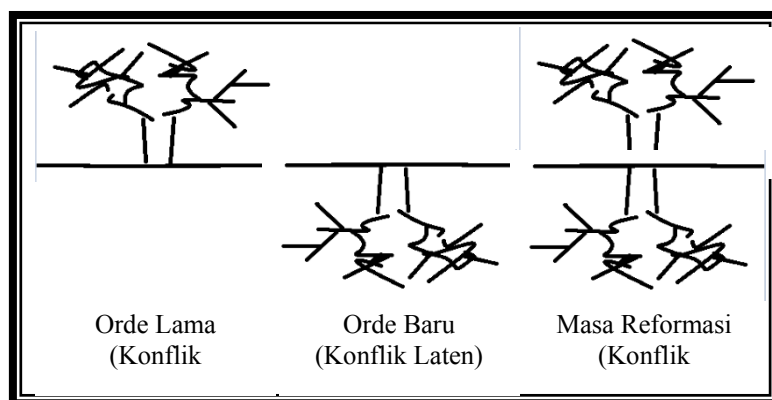
Harus diakui keragaman bahwa bangsa Indonesia memiliki sekitar 656 suku bangsa yang mendiami sekitar 30 ribu pulau yang menyebar di wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke dari Talaud hingga Timor. Belum lagi beragam agama yang diakui oleh negara mejadi lima agama dan adat istiadat yang sangat beragam. Perbedaan ini disatukan



## DILEMATIS MEDIA DALAM PEMBERITAAN KONFLIK DAN KEKERASAN

oleh pendiri bangsa dalam ‘Bhineka Tunggal Ika’ berbeda-beda tetapi tetap satu. Namun banyaknya perbedaan ini justru membawa Indonesia sebagai negara yang sangat rawan dengan konflik. Kalau di jaman orde lama konflik digambarkan sebagai akar yang tumbuh ke atas permukaan. Konflik ini dikelola dan sumber konflik langsung dipangkas oleh penguasa. Di era Orde Baru,

konflik laten digambarkan dengan akar yang tumbuh ke dalam dengan pengertian konflik disembunyikan dan sumber konflik direpresi. Sedangkan di era reformasi konflik terjadi secara terbuka digambarkan dengan akar yang tumbuh ke atas dan kebawah yang artinya konflik cenderung dibiarkan dan sumber konflik kadang tidak tersentuh (Stanley,2005).



**Gambar 4.** Model Konflik di Indonesia.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Agama dan Lintas Budaya atau *Centre for Religious and Cross Cultural Studies (CRCS)* UGM tentang Kehidupan Beragama di Indonesia tahun 2011 menyebutkan bahwa kekerasan atas nama agama kerap saja muncul di tahun 2011 dan tidak ada perbedaan secara signifikan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa isu utama yang kerap menjadi masalah adalah penodaan, penyimpangan agama dan

soal rumah ibadah ([metrotvnews.com](http://metrotvnews.com)). Apa yang disebutkan dalam laporan ini memperlihatkan bahwa negara kita sangat rawan akan terjadi konflik baik itu konflik karena agama, suku maupun konflik sosial lainnya.

Konflik terbuka di era reformasi ini juga dimanfaatkan oleh media massa untuk memainkan peranannya yang justru memperhebat konflik-konflik yang terjadi. Bisa dikatakan media massa di Indonesia tidak

memiliki pengalaman dalam meliput serta memberitakan konflik. Selama 32 tahun Orde Baru berkuasa, media massa dilarang memberitakan semua hal yang berhubungan dengan pertentangan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA). Sehingga saat kekuasaan Orde Baru berlalu dan masa reformasi lahir, dimana keterbukaan informasi pada pers berkembang sangat dasyat yang justru berujung pada keterbukaan media massa yang kebablasan. Hampir semua berita tentang konflik ditayangkan secara vulgar dengan tindak kekerasan.

Tim Allen dan Jean Seaton (1999) mengakui bahwa adakalanya liputan media malah memperkeruh suasana konflik. Keduanya berpendapat bahwa sebagian perang justru dilahirkan oleh media. Yang artinya media dapat mengarahkan strategi perang dan mempertajam perseteruan. Sedangkan Denis Mc Quail (1994) mengemukakan bahwa media massa dengan berbagai cara dapat menimbulkan kerusuhan, menciptakan budaya huru hara, menyebarkan kekacauan dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini biasanya dipicu oleh berita yang tidak lengkap dan menyesatkan serta didorong oleh kepentingan-kepentingan pribadi media massa.

Pakar jurnalisme damai Johan Galtung (dalam Stanley Cohen dan Jack Young, 1973)

mengatakan bahwa kecenderungan media massa berperan sebagai pemicu konflik yang biasanya muncul karena media massa bersangkutan lebih cenderung menerapkan paradigma jurnalisme perang yang banyak dipraktekkan pers Barat. Jurnalisme ini cenderung terfokus pada kekerasan sebagai penyebab konflik dan enggan menggali secara mendalam akar struktural suatu konflik. Dan terlalu mengkonsentrasikan diri pada efek yang tampak dipermukaan saja dan bukannya pada kerusakan psikologi struktural dan kultural.

Apa yang terjadi dalam tragedi bom India dan penyerangan 26 November 2008 di Mumbai adalah contoh yang gamblang tentang hal ini. Teror bom itu melahirkan cerita horor dimana pers justru memberi andil. Tak lama setelah bom meluluhlantahkan Taj Mahal Palace Hotel, beberapa stasiun televisi India nekat melakukan siaran langsung atas proses evakuasi dan penanganan lokasi peristiwa. Pasukan anti teror India tidak berhasil melarang siaran langsung itu karena wartawan televisi melontarkan argumentasi yang sulit dibantah yaitu publik berhak tahu atas apa yang terjadi di Taj Mahal Hotel akibat serangan teroris. Yang tidak terpikirkan oleh para wartawan yang bertindak seola-ola sebagai pahlawan ini, sejumlah pelaku penyerangan dari kelompok *Deccan Mujahidin*

## DILEMATIS MEDIA DALAM PEMBERITAAN KONFLIK DAN KEKERASAN

yang masih terjebak di dalam hotel, dengan menyandera banyak orang, juga turut menonton siaran langsung yang mereka tayangkan. Dari layar televisi di dalam Taj Mahal Palace Hotel, mereka mengetahui gerak-gerik pasukan anti teror yang hendak

menyerbu hotel. Begitu pasukan anti teror merangsek masuk ke dalam hotel, para teroris segera memberondong mereka dengan tembakan yang mematikan. Belasan polisi India tewas gara-gara kecerobohan stasiun televisi tersebut.



**Gambar 5.** TV Nasional India menayangkan siaran langsung penyerapan teroris di Taj Mahal Palace Hotel, Mumbai, 26 November 2008  
(Capture video to picture: courtesy of YouTube)

Disinilah sebenarnya diakui atau tidak media melalui pekerjaannya (para jurnalis/wartawan) ikut memiliki kekuatan dalam mengungkapkan peristiwa melalui media massa sebagai wadah pembingkai (*framing*) berita. Berita dengan bingkai kekerasan yang memicu perpanjangan konflik atau sebaliknya, membingkai perdamaian yang berujung pada berakhirnya konflik.

### **Fungsi Media dan Berita Konflik/ Kekerasan**

Sebagai media komunikasi, lembaga sosial, produk informasi, dan lembaga

ekonomi fungsi utama media adalah sebagai mediator, mengawasi, menyediakan informasi dan menghibur (Abrar, 2011). Dalam menjalankan kegiatan mediasi, media seharusnya bersifat netral dan tidak berpihak. Artinya dalam pemberitaan tentang konflik, media benar-benar menyampaikan pesan dari kedua belah pihak yang bertikai. Sekalipun sikap netral tidak mudah dilakukan, namun media harus tetap berusaha untuk tidak berpihak. Karena hanya dengan memiliki sikap yang netral dan tidak berpihak pada satu golongan yang berkonflik maka media dapat menjalankan fungsinya sebagai mediator.

Penelitian yang dilakukan oleh Fita Fathurokhmah (2011) mengkaji isi 2 surat kabar nasional yaitu Republika dan Tempo (edisi November 2007- Januari 2008) dengan melihat bagaimana kedua media ini mengulas berita tentang komunitas agama Jemaah Akhmadiyah. Hasil penelitian menyebutkan bahwa surat kabar Republika melalui beritanya mengkonstruksi atau membingkai realita Jemaah Akhmadiyah sebagai aliran sesat, menyimpang, aliran keagamaan, aliran sempalan, musyrik dan murtad sementara koran tempo membingkai realitas Jemaah Akhmadiyah sebagai kebebasan dalam beragama, dan dalam pemberitaannya koran Tempo mengutamakan untuk mengakomodir kepentingan masyarakat umum dan diambil dari sudut pandang kemanusiaan atau sisi humanisme bukan dari perspektif umat Islam. Dari hasil penelitian ini kita dapat melihat bahwa koran Tempo berusaha untuk bersifat netral dalam membingkai berita konflik tentang Jemaah Akhmadiyah. Sebaliknya surat kabar Republika dengan tegas mengatakan golongan Akhmadiyah sesat dan tentunya sama sekali tidak berpihak pada golongan ini. Hal ini juga sangat berhubungan erat dengan ideologi yang dianut masing-masing surat kabar, sehingga menghasilkan konstruksi sedemikian rupa.

Media juga memiliki fungsi mengawasi yang mau tidak mau harus membela masyarakat tanpa memandang status dan latar belakang masyarakat tersebut. Artinya bahwa media harus menjalankan fungsi pengawasan secara proporsional. Sangat disayangkan bahwa kenyataan yang ada sekarang tidak semua media melakukan fungsi ini dengan maksimal. Dalam pemberitaan konflik, setiap media memiliki persepsi yang berbeda-beda. Ini disebabkan karena diperhadapkan dengan hal yang klasik yaitu aturan main dimasing-masing media yang juga berbeda.

Contoh pemberitaan tentang konflik yang telah digambarkan diatas bahwa Metro TV cenderung dalam pemberitaannya lebih mengangkat sisi kekerasan ketimbang perdamaian dari sebuah konflik. Itu karena aturan main redaksional media ini yang telah mempatenkan hal tersebut sehingga berita terbingkai sedemikian rupa. Seharusnya sebagai media, fungsi pengawasan tetap harus ditegakkan dengan menyampaikan berita-berita sebagai alat kontrol. Dimana tidak lagi memuat atau menyiarkan berita-berita yang cenderung buruk dan disertai kekerasan, tidak pada tempatnya, tanpa etika dan menyalahi aturan. Karena apa yang dipersepsikan oleh masyarakat bahwa berita buruk akan selalu menghasilkan sesuatu yang buruk pula.

## DILEMATIS MEDIA DALAM PEMBERITAAN KONFLIK DAN KEKERASAN

Misalnya pemberitaan kekerasan konflik yang terus berulang-ulang ditayangkan melalui media justru akan membentuk persepsi masyarakat menjadi hal yang biasa, dan orang akan cenderung menyelesaikan konflik juga dengan kekerasan. Padahal idealnya media harus mengawasi agar konflik ini tidak berkepanjangan dan justru berujung pada penyelesaian konflik.

Fungsi media sebagai produk informasi adalah menyediakan informasi. Dan seluruh dunia sepakat rentang hal tersebut. Media memang wajib menyampaikan informasi yang jujur dan benar sesuai fakta peristiwa kepada masyarakat. Tetapi dalam pemberitaan tentang konflik, media sedapat mungkin bisa mencerahkan pikiran publik dengan mengungkapkan fakta dan peristiwa secara berimbang. Dengan pengertian bahwa pekerja media tidak membuat liputan dan pemberitaan yang mengorbankan konflik atau memecahkan persatuan rakyat.

Tetapi sekali lagi bahwa hal itu tidak mudah dilakukan. Masih banyak media yang menyimpang dalam menyebarkan informasi. Hal ini yang seharusnya dikhawatirkan karena jika media memuat semua informasi tanpa kendali, keamanan dan ketenangan maka masyarakat bisa berada dalam ketegangan dan ketidaknyamanan. Dari beberapa contoh berita

konflik yang ada, media kita cenderung begitu mudah menerima kebenaran berita dari segala penjuru. Meski berita tersebut mengandung unsur SARA, tetapi media cenderung tidak melakukan penyeleksian. Padahal dalam proses seleksi, media harus memperjelas visi dan misi media mereka agar tidak melenceng dari garis redaksional yang telah ditetapkan. Dan yang tidak kalah pentingnya pekerja media harus mampu mengasah naluri jurnalistiknya dalam menilai setiap peristiwa apalagi yang mengandung unsur SARA apakah layak dikonsumsi masyarakat atau tidak. Hal inilah yang disebut dengan memiliki etika dan profesionalisme. Sehingga dalam pengungkapan suatu peristiwa media massa dan wartawan memiliki tanggungjawab moral terhadap kebenaran informasi.

Jika diperhadapkan dengan peristiwa konflik atau pertikaian maka media harus bisa menerapkan jurnalisme damai dengan membingkai konflik pada pengungkapan informasi konflik bukan arena konflik atau kejadian kekerasannya. Dalam hal ini media mengidentifikasi berbagai pihak yang terlibat konflik, meluruskan isu-isu yang ada serta mengungkapkan akar permasalahan yang mungkin terkait dengan sejarah, psikologi sosial maupun budaya. Di sinilah peran dan fungsi media yaitu mengungkapkan fakta tanpa

## DILEMATIS MEDIA DALAM PEMBERITAAN KONFLIK DAN KEKERASAN

menyulut isu melainkan kepada pencarian solusi permasalahan. Media tidak hanya sebagai sarana untuk memuat pesan dan informasi belaka, namun seharusnya juga dapat menjadikan suatu peristiwa menjadi berita yang menarik bagi khalayak dan memunculkan empati dengan menekankan bahwa kekerasan hanya membuahkan kesengsaraan. Karena itu jeritan-jeritan korban khususnya perempuan dan anak-anak sebagai korban konflik lebih ditonjolkan ketimbang kelompok-kelompok elit yang bertikai.

Sebuah berita di rubrik Internasional, Kompas Rabu, 18 April 2012 berjudul *“Konflik di Sudan Makin Sengit, Berebut Ladang Minyak Heglig, Khartoum Intensifkan Pengeboman”*. Seperti yang disebut judulnya, berita yang bersumber dari AFP/AP/REUTERS/CAL sangat bombastis. Baru saja membaca judulnya, pastilah kita sepakat berasumsi bahwa telah terjadi perang saudara antara Sudan dan Sudan Selatan. Bahkan dalam paragraf pertama berita ini memaparkan

bahwa : *Sudan pada Senin (16/4) membombardir beberapa daerah di perbatasan, terutama Heglig, pemicu bentrokan selama dua pekan terakhir.* Paragraf-paragraf selanjutnya menggambarkan secara detail bagaimana pertempuran dan penyerangan itu berlangsung. Meski pemaparan berita oleh wartawan ini sangat vulgar soal perang termasuk menyebutkan jumlah korban tewas, tetapi masih menyertakan pendapat dari dua pihak yang bertikai yaitu pejabat militer Sudan Selatan (sebagai pihak yang menjadi korban pengeboman) dan pemerintah Sudan (sebagai penyerang).

Namun hasil wawancara kedua pihak ini saling bertolak belakang. Sang korban menjelaskan bagaimana mereka diserang, dan sang penyerang menjelaskan bahwa mereka menolak dialog damai dengan Sudan Selatan. Sungguh pemberitaan yang sama sekali tidak akan berujung pada upaya damai.



**Gambar 6.** Konflik Sudan dan Sudan Selatan

## DILEMATIS MEDIA DALAM PEMBERITAAN KONFLIK DAN KEKERASAN

Tetapi dibagian akhir dari berita ini ikut digambarkan bahwa : *Penyerangan Sudan tersebut telah menyasar antara lain fasilitas markas kantor PBB yang berada di Sudan Selatan. Sehingga Sekertaris Jenderal PBB Ban Ki Moon mendesak segera dilakukan gencatan senjata, melindungi warga sipil dan menghormati hukum internasional tentang kemanusiaan.* Paragraf terakhir ini paling tidak ada sedikit upaya damai yang dilakukan media, setelah dibagian awal dengan tegas menuliskan berbagai tindak kekerasan yang terjadi. Dari contoh ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sangat tidak mudah bagi sebuah media untuk menjadi juru damai bagi kelompok yang bertikai. Memang benar bahwa media telah melaksanakan peran dan fungsinya sebagai penyedia informasi sehingga semua orang bisa mengetahui keadaan yang sesungguhnya terjadi di wilayah konflik, tetapi juga menimbulkan keresahan dan perasaan benci serta ketakutan dan juga tidak adanya rasa empati.

Media sebagai lembaga ekonomi memiliki fungsi yaitu menghibur. Mungkin kita bertanya-tanya dalam pemberitaan konflik dimana unsur menghiburnya? Media yang menghibur artinya dapat memberikan hiburan yang sehat dan kesenangan kepada masyarakat. Salah satunya dengan tidak

mencampuradukan antara fakta dan opini dari kelompok yang bertikai. Disamping itu lebih banyak menyampaikan atau memberitakan upaya-upaya perdamaian sehingga masyarakat yang bertikai pada saat membaca atau menonton atau mendengar berita tersebut merasa terhibur dan tenang. Tidak hanya itu publik umum diluar kelompok yang bertikai juga dapat merasakan ketenangan dan perasaan empati dan berupaya membantu upaya perdamaian dari segi realnya.

Dari beberapa fungsi media massa yang dipaparkan di atas, kenyataannya bahwa media memang selalu diperhadapkan dengan dilema dan masalah. Jika kita melihatnya dari pendekatan objektivitas berita, maka akan tergambar media yang tetap mengusung objektivitas dimana berita konflik yang dimuat bersifat netral, mengandung kebenaran dan lain sebagainya. Tetapi ada juga media yang bersifat konstruksi dimana seolah-olah wartawan menjadi aktor di dalam pemberitannya sehingga terkadang kebenaran dan netralitas tidak berlaku, karena menurut mereka masyarakat telah mampu untuk memilah dan menilai mana berita yang baik dan mana yang tidak.

Dan ketika kita melihat masalah media ini dari sisi politik pemberitaan, maka kita juga perlu melihatnya dari dua pendekatan yaitu

jurnalisme dan kepemilikan media. Pendekatan jurnalisme merupakan bagian dari kebijakan redaksional dan hal ini akan berpihak pada kebenaran, nasionalis pluralism serta mendorong orang untuk bebas berpendapat. Sedangkan pendekatan kepemilikan media akan mengarah pada ideologi yang dianut masing-masing media. Sehingga terkadang media sangat nasionalis terhadap agama tertentu atau nasionalis terhadap statusquo atau terkesan sangat berpihak kepada pemerintah dalam arti apa yang disampaikan oleh para penguasa itulah yang dianggap benar dan diberitakan. Contoh kasus konflik yang terjadi di Papua, dimana dalam pemberitaannya, banyak media yang terkesan melindungi atau pro terhadap aparat keamanan dan aparat diberitakan berada dalam posisi yang tidak harus bertanggungjawab (bersalah) atas konflik kekerasan tersebut.

Politik pemberitaan juga sangat dipengaruhi oleh aspek ekonomi politik, organisasi dan kultural. Aspek ekonomi politik berada di luar proses penulisan atau penyiaran pemberitaan, sementara aspek organisasi berada di dalam, yang berhubungan dengan orang-orang yang bekerja pada sebuah media, dan aspek kultural merupakan pendekatan yang menggabungkan aspek ekonomi politik dan organisasi media. Banyaknya aspek yang

saling kait mengait serta berbagai kepentingan di dalamnya, kadang yang membuat media dan pekerja media diperhadapkan dengan dilema untuk tetap melaksanakan fungsi jurnalismenya dengan mengikuti aturan-aturan yang berlaku atau mengikuti kepentingan-kepentingan pemilik media.

### **Jangan Melupakan Profesionalitas, Etika dan *Self Censorship***

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan amanat Undang-Undang, maka media dituntut memiliki sumber daya manusia yang berkemampuan, berpengetahuan dan beretika. Inilah prasyarat jika ingin menjadi jurnalis/wartawan profesional (Kompetensi Wartawan, Dewan Pers, 2006). Karena media hanya bisa memerankan fungsinya dengan baik jika tertib dan tidak mengabaikan kaidah-kaidah jurnalisme. Banyak perusahaan media yang berdiri sengan sumber daya seadanya yang tidak layak disebut dengan lembaga yang sehat. Hal ini justru tidak memungkinkan memperkerjakan para jurnalis yang memenuhi syarat dan mampu membangun sumber daya yang profesional.

Mengapa wartawan harus profesional? Karena media memiliki kekuatan untuk mempengaruhi publik melalui informasi dan wartawan memiliki 'hak istimewa' dalam



## DILEMATIS MEDIA DALAM PEMBERITAAN KONFLIK DAN KEKERASAN

menjalankan profesinya seperti hak mendapatkan akses informasi dan hak tolak. Profesionalisme wartawan merupakan tingkat kemampuan wartawan dalam menyadari, memahami dan trampil menyelesaikan pekerjaannya. Wartawan dituntut sadar tanggung jawab sosial, memahami visi dan misi media serta menguasai hal-hal teknis yang terkait dengan pekerjaan media. Wartawan profesional bekerja untuk kepentingan perusahaan, publik, bkhlayak luas dan bangsa (Ishadi.SK. 2003). Meski wartawan dituntut bekerja untuk kepentingan perusahaan yang notabene lebih mementingkan aspek komersial (ekonomi), namun wartawan dan media dituntut bisa menjadi mata dan hati bagi publik. Karena jika sudah menempatkan diri pada kepentingan pasar maka media/wartawan secara otomatis akan mengusung asas '*bad news is a good news, bad picture is a good picture*' dimana berita buruk adalah berita baik dan gambar buruk adalah gambar baik. Tidak heran apa yang ditayangkan media massa dewasa ini yaitu cenderung menjual gambar-gambar, atau visualisasi-visualisasi paling berdarah, kekerasan dan sensasional ketimbang mementingkan kebenaran isi beritanya.

Penetrasi pasar dalam industri media ditunjukkan oleh terus meningkatnya angka

belanja iklan di media massa. Survei Nielsen Media Indonesia terhadap 103 koran, 165 majalah dan tabloid serta 24 stasiun televisi nasional maupun lokal menunjukkan bahwa belanja iklan untuk semua media massa pada tahun 2009 mencapai 48,5 triliun. Jumlah ini meningkat 16 % dari tahun sebelumnya (Kompas, 13 Feb 2012). Angka ini memperlihatkan bahwa gerak pengoperasian media sangat ditentukan oleh pendapatan dari iklan. Akibatnya sering kali aspek ideologis terkalahkan oleh aspek komersial. Akhirnya media terjebak dalam perdagangan berita yang menyiarkan serta memuat foto-foto atau tayangan-tayangan berkualitas rendah demi mendongkrak oplah atau untuk meraih pangsa pasar yang berselera rendah dan ketatnya persaingan antar media.

Di samping profesionalitas, etika media/wartawan juga harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan tugas jurnalistik. Dewan Pers (2006) merumuskan salah satu kompetensi wartawan yang dibutuhkan saat ini adalah kesadaran (*awarness*). Dimana dalam melaksanakan tugas, wartawan dituntut menyadari norma-norma etika dan berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan karya jurnalistik. Kesadaran akan etika merupakan hal yang sangat penting dalam profesi wartawan. Dengan adanya kesadaran tersebut,

mekanisme kerja wartawan akan selalu mengacu pada kode perilaku, sehingga setiap langkahnya akan selalu dilandasi pertimbangan yang matang termasuk dalam mengambil keputusan penulisan isu-isu yang sensitif dalam pemberitaan konflik. Adanya kesadaran etika tersebut juga akan memudahkan wartawan dalam mengetahui kesalahan-kesalahan dan menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan tersebut. Karena kurangnya kesadaran akan etika dapat berakibat serius. Ketiadaan petunjuk moral yang dengan tegas mengarahkan nilai-nilai dan memandu prinsip dapat menyebabkan wartawan mengalami kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Karena itu pemahaman kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Pers serta aturan-aturan lainnya sangat penting bagi semua pekerja media.

Sensor pribadi (*self censorship*), hati nurani dan tanggung jawab sosial dari para jurnalis sangat penting untuk mengukur dan menilai arti sebuah pemberitaan konflik. Dokumen pengaduan dari masyarakat yang diterima oleh Dewan Pers sepanjang tahun 2001-2007 dan dari Fokus Grup Diskusi antar para jurnalis Indonesia dan Australia pada tanggal 8-11 November 2010 di Canberra dan Sydney menunjukkan bahwa jurnalis cenderung untuk memainkan fungsinya

berdasarkan permintaan media dan kebutuhan pasar. Sejalan dengan itu, ada banyak media yang dengan sengaja bertindak tidak relevan. Karena itu, implikasi dari masalah ini, bahwa sensor pribadi tetap harus menyatu dengan proses intelektual jurnalis dalam memainkan fungsinya sebagai ujung tombak dari media massa serta kesetiaannya pada kebenaran dan masyarakat.

### KESIMPULAN

Uraian diatas menjelaskan bahwa media dimanapun dia berada dan beroperasi selalu memiliki potensi fungsional dan juga disfungsional. Media massa dinilai memiliki potensi fungsional karena berpotensi untuk menebar semangat perdamaian dan meredakan konflik. Sebaliknya media massa juga dinilai memiliki potensi disfungsional karena memang berpotensi untuk memperkeruh atau bahkan memicu konflik yang berkepanjangan.

Kini saatnya media massa mengakomodir berbagai paradigma alternatif yang memungkinkan terbangunnya suasana perdamaian melalui berita-berita yang mengusung jurnalisme perdamaian dimana profesional, etika, hati nurani serta sensor pribadi ikut menyatu di dalamnya. Jurnalisme damai sebagai salah satu jurnalisme yang memiliki potensi fungsional bagi media massa dalam membangun suasana yang kondusif di

daerah konflik dan juga sebagai mediator dalam proses penyelesaian konflik. Dengan demikian, fungsi media yang sesungguhnya yaitu sebagai mediator, menyediakan informasi dan menghibur dapat terlaksana secara maksimal. mengawasi,

### DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Ana Nadhya. 2011. *Analisis Pers Teori dan Praktek*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Afifi, Subhan. 2010. *Tayangan Bermasalah dalam Program Acara Televisi di Indonesia*. Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 8, Nomor 3, September - Desember 2010, halaman 246 – 262
- Ahmadi, Dadi dan Nova Yohana M. 2007. *Kekerasan di Televisi: Perspektif Kultivasi*. Mediator, Vol.8 No.1 Juni 2007 <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=117262&val=5336> diakses 23 Februari 2015.
- Allen, Tim dan Jean Seaton. 1999. *The Media of Conflict : War Reporting and Representations of Ethnic Violence*. New York : Zed Books.
- Anderson, C.A., Bushman, B.J. 2001. *Effect of Violent Video Games on Aggressive Behavior, Aggressive Cognition, Aggressive Affect, Psysiological Arousal, and Prosocial Behavior; A Meta-Analytic Review of Scientific Literature*. American Psychological Society, 12 (5), 353-359
- Anderson, C.A., Bushman, B.J. 2002. *Violent Video Games and Hostile Expectations: A Test of the General Aggression Model*. Personality and Social Psychology Bulletin, 28 (12), 1679-1686
- Dewan Pers. 2006. *Kompetensi Wartawan. Pedoman Peningkatan Profesionalisme Wartawan dan Kinerja Pers*. Jakarta : Sekretariat Dewan Pers.
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Jogjakarta: LKIS.
- Fathurokhmah, Fita. 2011. *Wacana Komunitas Agama : Sebuah Propaganda di Media*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Vol.2. No.2. Tahun 2011. Jakarta : Balitbang SDM Kemkominfo RI.
- Focus Group Discussion (FGD) Wartawan Media Indonesia-Australia, *Self Censorship dalam Bilateral Inter Media Dialog - BIMD*, Canberra dan Sydney, 9-11 November 2010.
- Freedman, J.L. 1986. *Television Violence and Aggression : A Rejoinder*. Psychological Bulletin, 100 (3), 372-378
- Galtung, Johan. 1973. *Structuring and Selecting News. Dalam Stanley Cohen dan Jack Young (ed). Manufacture of News : Deviance and the Mass Media*. London : Constable.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa, Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik*. Jakarta: Granit.
- Hasfi, Nurul. 2011. *Kekerasan Simbolik (Symbolic Violence) Terhadap Suku Jawa Dalam Program TV "Hidup Ini Indah" di Trans TV*. [http://eprints.undip.ac.id/33025/1/Kekerasan\\_Symbolik\\_atas\\_Suku\\_Jawa\\_dalam\\_Program\\_TV\\_lengkap.pdf](http://eprints.undip.ac.id/33025/1/Kekerasan_Symbolik_atas_Suku_Jawa_dalam_Program_TV_lengkap.pdf), diakses 23 Februari 2015.

## DILEMATIS MEDIA DALAM PEMBERITAAN KONFLIK DAN KEKERASAN

- Ishadi, SK.2003. *Konsep Profesionalisme dalam Industri Media Massa*. Jakarta: Depkominfo.
- Kompas, Rabu 18 April 2012. *Konflik di Sudan Makin Sengit*.
- Kompas, Senin 13 Februari 2012. *Jajak Pendapat Kompas Pers Belum Bisa Memberikan Solusi*.
- Liputan 6 SCTV, edisi 14 April 2010. *Tanjung Priok Berdarah*.
- McQuail, Denis. 1994. *Mass Communications Theory : An Introduction, third editions*. London: Sage Publications.
- Metrotvnews.com. 22 Maret 2012. *Kekerasan atas Nama Agama di Indonesia Enggan Menyusut*.
- News Metro TV, edisi 5 Maret 2010. *Rusuh Makassar*.
- Republika.18 November 2014. *KPI Terima 13805 aduan Sepanjang 2014*. <http://www.republika.co.id/berita/koran/hukum-koran/14/11/18/nf7yla7-kpi-terima-13805-aduan-sepanjang-2014> diakses 23 Februari 2015.
- Setiasi, Eni. 2005. *Ragam Jurnalistik Baru Dalam Pemberitaan*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Sobur, Alex. 2001. *Analisis Teks Media*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Stanley, 2006. *Posisi dan Peran Media dalam Pemberitaan Konflik (Pelajaran dari Ambon dan Konflik Lainnya)*. Bunga rampai Membangun Pers Nasional yang Bebas, Profesional dan Bermartabat. Jakarta : Depkominfo RI.
- Youtube.com. [www.youtube.com](http://www.youtube.com)